

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada triwulan II 2025, Provinsi Jawa Barat mengalami inflasi sebesar 0,27% (mtm), lebih rendah dibanding inflasi nasional sebesar 0,19% (mtm). Dengan pencapaian tersebut maka secara tahunan inflasi Jawa Barat menjadi 1,78% (yoy). Inflasi Jawa Barat pada bulan Juni 2025 terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,23%. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi (mtm) yaitu cabai rawit sebesar 0,05%, beras sebesar 0,03%, serta bawang merah, tomat, telur ayam ras, dan daging ayam ras sebesar 0,02%. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi (mtm), yaitu: bawang putih sebesar 0,03%, minyak goreng dan pisang masing-masing sebesar 0,01%. **Di sisi lain, kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga juga tercatat memberikan andil inflasi sebesar 0,03% (mtm)** dengan komoditas andil inflasi yaitu bahan bakar rumah tangga dengan andil sebesar 0,02%.

Secara spasial, seluruh Kab/Kota pantauan IHK di Jawa Barat mengalami inflasi (yoy). Inflasi tertinggi terjadi di Kota Sukabumi sebesar 3,26 persen dengan IHK sebesar 109,72 sedangkan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Bandung sebesar 1,38 persen dengan IHK sebesar 108,84. Di sisi lain, apabila dilihat secara mtm, inflasi tertinggi terjadi di Kota Cirebon sebesar 0,46% dan inflasi terendah terjadi di Kota Tasikmalaya sebesar 0,12%.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Sebagai upaya pengendalian inflasi di daerah, TPID Provinsi Jawa Barat memiliki program kerja strategis berdasarkan *roadmap* pengendalian inflasi di daerah. Adapun permasalahan yang dihadapi terkait kenaikan harga yang terjadi selama triwulan-II 2025 yaitu:

1. Harga sejumlah komoditas bahan pangan seperti beras, daging ayam ras, dan cabai merah di wilayah Bandung Raya mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha;
2. Cuaca ekstrem menyebabkan harga tomat mengalami kenaikan;
3. Pemerintah Kota Bekasi menetapkan kenaikan tarif PDAM untuk yang berlaku sejak Maret 2025 (Pembayaran April 2025);
4. Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kilogram di wilayah Bandung Raya mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp 16.600,- menjadi Rp 19.000,- yang berlaku sejak 16 Juni 2025;
5. PT Pertamina Persero melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak Non Subsidi jenis Pertamina Series dan Dex Series sejak 1 Juni 2025;
6. Hingga Triwulan II harga emas dunia masih menunjukkan tren peningkatan;
7. Diskon tarif listrik kepada pelanggan pasca bayar telah berakhir sehingga tarif listrik kembali normal mulai April 2025.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga laju inflasi agar selalu berada dalam *range* target yang telah ditetapkan, TPID Provinsi Jawa Barat telah menyelenggarakan beberapa kegiatan sebagai berikut yaitu sbb:

Pasamoan Agung (*High Level Meeting*) TPID dalam rangka memperkuat pengendalian inflasi dan perluasan akses digitalisasi di Provinsi Jawa Barat sebagai upaya menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan pada 11 Juni 2025;

2. Rapat Koordinasi Dwimingguan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sebanyak 5 kali selama Triwulan II;
3. Pemantauan Harga Pangan di 81 Pasar oleh Kabupaten/Kota setiap hari yang disajikan dalam SILINDA JABAR;
4. Pertemuan Penyampaian Laporan Perkembangan Harga Komoditas Pangan Strategis serta Upaya Pengendalian Inflasi oleh Tim Teknis Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah Jawa Barat (SILINDA JABAR) sebanyak 3 kali selama Triwulan II;
5. Survei Harga Pangan Strategis di Pasar 27 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan setiap bulan.
6. Pengelolaan CPPD oleh BULOG per 30 Juni 2025, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. CPPD Provinsi sebesar 2.060,81 ton beras dan
 - b. CPPD Kabupaten/Kota antara lain:
 - Beras: 3.007,15 ton
 - Gabah: 63,59 ton
 - Gula Pasir: 7 ton
 - Telur ayam: 35,56 ton
 - Minyak Goreng: 150,89 KL
7. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah sampai dengan 25 Juni 2025 sebanyak 481 kali;
8. Mobil Pangan Keliling Jawa Barat (Mobil Paling Jawara) dilaksanakan sebanyak 20 kali;
9. Penyerapan Gabah/Beras PSO per 25 Juni 2025 sebanyak 471.930 Ton;
10. Penyerapan Jagung PSO per 25 Juni 2025 sebanyak 26,19 ton;
11. Penjualan Minyakita di wilayah Jawa Barat per Tanggal 25 Juni 2025 mencapai 754.980 L;
12. Fasilitasi Distribusi Pangan sebanyak 687.500 Kg;
13. Optimalisasi distribusi pangan di 119 Kios Pangan;
14. Gelar Produk Pasar Tani sebanyak 12 kali;
15. Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI) menjelang HBKN Idul Adha;
16. Monitoring pasokan dan stabilisasi harga komoditas bawang putih, menindaklanjuti arahan dari Kementerian Perdagangan;
17. Pemberian bantuan pompa bertenaga surya untuk mengoptimalkan lahan tadah hujan;
18. Pemberian bantuan bantuan benih padi inbrida (Padi Biofortifikasi, Padi Lahan Kering, Padi Lokasi Pompanisasi, Padi Lokasi Lahan PU/BBWS, Padi Reguler) dan bantuan benih jagung hibrida (Jagung Lokasi Perkebunan/POLRI, Jagung Reguler);
19. Pemberian bantuan Pupuk Organik Cair dan Pupuk Hayati Cair sebagai upaya
- 1.

meningkatkan bahan organik dan pH tanah agar produktivitas bisa optimal.

20. Pengembangan komoditas tanaman cabai dan bawang merah melalui optimalisasi peran Petani Andalan dan Petani Champion;

21. Konservasi Lahan di DAS Citarum dengan Metode Teras Bangku pada Kawasan Hortikultura di DAS Citarum;

22. Gerakan pengendalian OPT terutama di wilayah yang terancam dan terdampak.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa kegiatan pengendalian inflasi yang telah dilakukan oleh TPID Jawa Barat secara umum berdampak dalam menekan laju inflasi. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi ke depannya seperti:

1. Sektor produksi pangan strategis, khususnya komoditas beras, jagung, bawang merah, dan cabai masih rentan dalam menghadapi anomali maupun gangguan cuaca sementara pada komoditas peternakan masih sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga pakan;
2. Penguatan dan pemutakhiran data ketersediaan dan kebutuhan serta data harga komoditas pangan strategis;
3. Pengelolaan stok belum optimal yang menyebabkan kekurangan saat bukan musim panen;
4. Kenaikan harga berbagai bahan baku dan BBM berdampak terhadap meningkatnya biaya produksi sehingga dapat meningkatkan harga komoditas;
5. Ketergantungan terhadap komoditas pangan impor, seperti bawang putih, jagung, gandum, gula pasir, dan lain-lain;
6. Tingginya hasil panen yang hilang dalam rantai pasok pangan;
7. Monitoring program/kegiatan terkait pengendalian inflasi daerah;
8. Antisipasi kondisi perekonomian global yang dapat berpengaruh terhadap harga komoditas andil inflasi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Langkah kebijakan yang diambil oleh TPID Provinsi Jawa Barat dalam pengendalian inflasi selama periode Triwulan-II 2025 di antaranya :

1. Stabilitas harga komoditas pangan strategis, melalui kegiatan pemantauan harga dan intervensi pasar serta penguatan distribusi pangan, sebagai berikut :
 - a. Pemantauan dan pelaporan harga komoditas pangan strategis secara harian melalui aplikasi Sistem Pengendalian Inflasi Daerah Jawa Barat (SILINDA JABAR) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan aplikasi Sistem Pemantuan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) milik Kementerian Perdagangan RI serta melakukan sidak pasar ke pasar tradisional, retail, modern, dan Distributor, khususnya untuk komoditas yang masih mengalami kenaikan harga dan berada di atas Harga Acuan Penjualan/Pembelian (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET).
 - b. Intervensi pasar, melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM), Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI), Pasar Tani, Pasar Pasisian Leuweung, Bazar Perikanan, Pasar Minggon Industri dan Perdagangan (Pasamoan).

Penguatan distribusi pangan, melalui kegiatan Kios Pangan, Mobil Pangan Keliling, pemberian Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) pada GPM, dan Pasar Lelang Komoditas untuk mempertemukan *Champion* komoditas pangan strategis/Produsen dengan pembeli melalui mekanisme pasar lelang sehingga terjadi pemerataan harga pangan.

2. Optimalisasi penyerapan Gabah Kering Giling (GKG) dan jagung di tingkat Petani, bekerjasama dengan BULOG Kanwil Jawa Barat, 27 Kabupaten/Kota, serta pihak terkait lainnya.
3. Gerakan tanam pangan cepat panen untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga, khususnya pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan kondisi tertentu.
4. Peningkatan produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas pangan impor dan mendukung upaya diversifikasi pangan, khususnya yang memiliki potensi sebagai substitusi beras.
5. Pengelolaan sumber daya pertanian yang sirkular dan terintegrasi, antara lain melalui pemanfaatan limbah peternakan sebagai bahan baku pupuk, serta limbah sekam padi sebagai sumber pakan ternak.
6. Optimalisasi peran desa sebagai pusat produksi pangan, dengan penguatan kelembagaan, sarana prasarana, dan dukungan teknologi tepat guna.
7. Stabilisasi *supply* saat masa panen sehingga memungkinkan penyimpanan dengan dukungan sarpras *dryer*, RMU, maupun Gudang.
8. Penguatan koordinasi lintas sektor melalui wadah TPID.